

ANALISIS *SPENDING REVIEW* DALAM ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017

M. Rafi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
m.rafi.psc19@mail.umy.ac.id

Dyah Mutiarin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Paisal Akbar

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
20 Maret 2020

Dinyatakan Diterima
12 Juni 2020

KATA KUNCI:
Spending Review, Alokasi Anggaran,
Pemerintah

KLASIFIKASI JEL:
H75, H76

ABSTRACT

*Currently, there is still a gap between inputs and outputs in the allocation of the state budget (APBN), indicating that the realized budget allocations have not been able to have a significant impact on economic growth and improvement in public welfare. To improve the quality of spending performance in the APBN in terms of value for money, it is necessary to measure government spending, which is carried out through spending reviews. This study aims to analyze the review of expenditure in budget planning to carry out savings initiatives in subsequent budget allocations. Then, this study uses a qualitative research method to explore a case study with descriptive qualitative analysis techniques that are conducted in a cycle and gradual manner. The results of the study found that the most indication of inefficient allocation was found for the maintenance and electricity expenditure budget, while the most duplicate indication was found for maintenance and capital expenditure (fixed assets), and there was no indication of *einmalig* in the 2017 budget allocation in the Province of the Islands Riau.*

Saat ini, masih ditemukan kesenjangan antara input dan output pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang direalisasikan belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja belanja dalam APBN dari segi *value for money*, diperlukan pengukuran belanja pemerintah yang dilaksanakan melalui *spending review*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan pengeluaran dalam perencanaan anggaran untuk melakukan inisiatif penghematan pada alokasi anggaran berikutnya. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi suatu studi kasus dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan secara siklus dan bertahap. Hasil penelitian menemukan bahwa Indikasi inefisiensi alokasi paling banyak ditemui untuk anggaran belanja biaya pemeliharaan dan listrik, sementara indikasi duplikasi paling banyak ditemui untuk belanja biaya pemeliharaan dan belanja modal (aset tetap), dan tidak ditemukan adanya indikasi *einmalig* pada alokasi anggaran tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Analisis spending review merupakan suatu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja belanja dalam APBN dari sisi *value for money*. Selain itu, *analisis spending review* juga bertujuan untuk menemukan inefisiensi anggaran dan memperluas wilayah fiskal. Kemudian, Perencanaan implementasi *spending review* merupakan pengadopsian praktik terbaik di berbagai negara maju, di mana tinjauan biaya didorong oleh tekanan keuangan dan melalui perencanaan penilaian pengeluaran, negara-negara seperti Indonesia dapat berusaha untuk mengidentifikasi peluang pengurangan anggaran dengan meningkatkan kualitas perencanaan (Parhusip, 2016). Pada dasarnya, *spending review* adalah metode untuk menilai efisiensi kebijakan, yang hasilnya membuat rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah ditahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien. Dimana temuan-temuan dari review pengeluaran akan menjadi umpan balik ke proses penganggaran berikutnya (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2013).

Penganggaran di ruang publik pada bidang ekonomi pada hakikatnya dapat bertindak sebagai instrumen administratif, karena penganggaran memiliki tujuan untuk memastikan bahwa Negara mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas dengan menambah pendapatan dan pengeluaran (Aisah et al., 2019; Firda Rahmadhany Arief et al., 2017; Nurulita et al., 2018; Veiga & Kurian, 2015).

Menurut Robinson dalam (Parhusip, 2016), *Spending review* pada dasarnya adalah bagian dari proses penganggaran berbasis kinerja, terutama karena informasi yang disajikan digunakan dalam pengambilan keputusan anggaran. Selanjutnya, *Spending*

review konsisten dengan pengembangan kerangka kerja penganggaran berbasis kinerja, karena data berkualitas yang disediakan oleh tinjauan pengeluaran akan mempromosikan proses penganggaran berorientasi kinerja. *Spending review* yang diadopsi sebelumnya di negara-negara maju kini dianggap sebagai solusi bagi Negara berkembang untuk kekurangan dalam sistem kebijakan konvensional yang merupakan prioritas keuangan. Dalam banyak contoh perencanaan anggaran, pemerintah telah lalai untuk mencari pada pengeluaran tertentu, hanya bersandar pada pengusulan pengeluaran baru. Akibatnya, anggaran yang disiapkan pemerintah masih dianggap tidak memadai dan tidak efisien. Ketidakseimbangan fokus pada pengeluaran pemerintah baru adalah masalah perhatian yang tidak seimbang yang dikenal sebagai inkrementalisme anggaran (Prakoso, 2017).

Spending review merupakan metode yang diyakini secara teratur dapat melacak pengeluaran dasar untuk mendeteksi dan adopsi inisiatif dalam penghematan, Langkah-langkah penghematan adalah tindakan langsung, seperti mengakhiri rencana atau merampingkan proses bisnis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan pengeluaran. Dalam hal pengeluaran dasar berarti pengeluaran untuk program dan proyek yang ada di tingkat yang disyaratkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku. Ini tidak termasuk pengeluaran untuk inisiatif baru atau untuk perluasan program yang sudah ada (Robinson, 2017). Kemudian perlu disadari juga salah satu alasan utama pemerintah menggunakan evaluasi anggaran adalah untuk mengurangi total investasi, atau mempertahankan produksi yang dibangun dari keuangan global. Berikut ini ditampilkan tabel tentang ulasan *spending review* agar dapat mengidentifikasi opsi penghematan pada alokasi anggaran pemerintah:

Tabel 1. Kriteria Ulasan yang Digunakan selama Pengeluaran Review untuk Mengidentifikasi Opsi Penghematan

Relevansi	Apakah program berusaha mencapai hasil bagi masyarakat yang penting?
Duplikasi	Apakah ada duplikasi dengan program atau lembaga lain di pemerintahan, atau dengan sektor swasta?
Efektivitas	Apakah program mencapai hasil yang diinginkan, dan, jika tidak, dapatkah itu diperbaiki sehingga melakukannya?
Efisiensi	Dapatkah layanan atau proses diproduksi dengan biaya lebih rendah, tanpa kualitas kompromi?
Equity	Apakah ada distribusi layanan atau transfer pembayaran antara berbagai kategori penerima adil?

Kegagalan pasar	Apakah pemerintah melakukan sesuatu yang bisa diserahkan kepada swasta organisasi sektor atau komunitas yang harus dilakukan?
-----------------	---

Sumber: (Hasil Penelitian Robinson, 2017).

Fenomena yang selalu ditemukan saat ini adalah terkait Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat besar dalam implementasi anggaran kementerian/lembaga yang masih ditemukan kesenjangan antara input dan output, dan hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang direalisasikan belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan barang/jasa publik.

Salah satu cara untuk mencapai peningkatan kualitas anggaran dan pengeluaran adalah dengan mencapai peningkatan anggaran sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja belanja dalam APBN dari segi value for money, diperlukan pengukuran belanja Pemerintah yang dilaksanakan melalui review belanja Pemerintah. *Spending Review* menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis atas penggunaan belanja Pemerintah (K. W. P. K. R. Dirjen Perbendaharaan, 2016).

Dalam APBN Tahun 2017, Pemerintah telah menerapkan kebijakan belanja negara yang memprioritaskan pada efisiensi dan penajaman belanja non operasional dan belanja non prioritas, kemudian lebih mendukung alokasi anggaran untuk peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (antara lain Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Keluarga Harapan), mendukung penegakan hukum serta stabilitas pertahanan dan keamanan, dan melaksanakan transfer ke daerah dan dana desa.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, alokasi Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp1.306,7 Triliun. Dalam APBN Tahun 2017, alokasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh rata-rata 5,4% menjadi Rp1.315,5 Triliun. Dalam APBN Tahun 2016, Belanja K/L memegang proporsi yang cukup signifikan dari total Belanja Negara, yaitu 37,4 persen. Secara nominal, Belanja K/L mengalami penurunan, mengingat di APBN Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp763,6 Triliun, dibandingkan di APBN-P Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp767,7 Triliun.

Penurunan nilai Belanja K/L ini seiring dengan penurunan anggaran Belanja Negara di tahun 2017. Secara proporsi, Belanja K/L di tahun 2017 justru meningkat, karena dianggarkan sebesar 36,7 persen dari total Belanja Negara. Komponen Belanja Pemerintah Pusat lainnya yang mengalami peningkatan alokasi secara nominal adalah Belanja Non-K/L yang terkait dengan Program Pengelolaan Utang Negara meningkat Rp.30 Triliun, Program Pengelolaan Belanja Lainnya meningkat Rp. 9,7 Triliun, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus meningkat Rp69,5 Triliun (K. K. R. Dirjen Perbendaharaan, 2017). Data diatas mengindikasikan tentang pentingnya melaksanakan anggaran secara efisien dan efektif untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Kecenderungan pengurangan alokasi Belanja K/L pun terjadi untuk satker penerima dana APBN di lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam APBN-P di tahun 2017, total alokasi anggaran pemerintah pusat untuk Belanja K/L di lingkup Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp6,061 Triliun (posisi per 18 Januari 2017). Namun demikian alokasi anggaran pemerintah pusat untuk Belanja K/L ini dapat meningkat sepanjang tahun anggaran 2017 mengingat masih terdapat DIPA yang belum ditetapkan, diantaranya DIPA untuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999), maupun DIPA untuk jenis kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang masih dapat bertambah sepanjang tahun anggaran 2017. Demikian pula sebaliknya, pemerintah pusat dapat mengurangi alokasi belanja pemerintah pusat untuk Belanja K/L apabila dipandang bahwa perlu dilakukan kebijakan penghematan/pemotongan anggaran dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara. Hal ini pernah terjadi di tahun anggaran 2016, saat pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan penghematan/pemotongan anggaran Belanja K/L sebanyak 2 (dua) kali.

Atas dasar itulah kemudian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan penyusunan laporan *Spending Review* pada tahun 2017 di tingkat wilayah. Hasil *Spending Review* tersebut akan dijadikan sebagai salah

satu referensi bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, *Spending review* juga dapat dijadikan masukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga periode yang akan datang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana Analisis *Spending Review* dapat dilakukan dalam alokasi anggaran pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017? Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan bagaimana realisasi belanja di kementerian/lembaga di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga berkaitan dengan seberapa penting dilakukan analisis *spending review* di Provinsi Kepulauan Riau melalui analisis inefisiensi, analisis duplikasi dan analisis einmalig.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan pengeluaran dalam perencanaan anggaran, selain itu, *Spending Review* juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran periode sebelumnya untuk melakukan inisiatif penghematan.

Dalam Kerangka Konseptual Tata Kelola Keuangan Publik, Analisis *Spending Review* pelaksanaan anggaran periode sebelumnya ini akan bermanfaat dalam memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran khususnya belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Untuk itu perlu diketahui bagaimana sesungguhnya Analisis *Spending Review* dalam alokasi anggaran di Provinsi Kepulauan Riau.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Konteks Alokasi Penganggaran

Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan manajemen keuangan publik yang menitikberatkan analisis atas pengaruh aktivitas anggaran berupa perpajakan dan belanja aktual dan bagaimana seharusnya aktivitas yang dimaksud untuk diterapkan (Parhusip, 2016). Sejak bergulirnya reformasi manajemen keuangan negara, penganggaran di Indonesia mengadopsi penganggaran berbasis kinerja, dimana anggaran disusun berdasarkan kinerja atau *output/outcome*. Hal ini sesuai dengan mandat yang tertuang dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Rencana kerja dan

anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai." Dengan kata lain bahwa dalam rangka alokasi anggaran, Pemerintah wajib menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja.

Menurut penelitian (Damar Daru Sukmaji & Abdul Rohman, 2019), konteks penganggaran selalu memiliki korelasi kepada aktor-aktor eksekutif dan legislatif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian keuangan publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. Dengan kemandirian, efektivitas dan efisiennya kinerja pemerintah pada hakikatnya akan dapat mengoptimalkan alokasi penganggaran yang ada (Nurulita et al., 2018). Untuk melihat tingkat penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi publik, maka pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya (Firda Rahmadhany Arief et al., 2017), Penganggaran publik merupakan cerminan dari kekuatan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau perspektif berbeda terhadap *outcomes* anggaran (Dewi Rosa Indah et al., 2017), Kebijakan penganggaran yang tidak melihat seseorang/kelompok yang berdasarkan kepentingannya, haruslah menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan itu sendiri (Y. Sri Pudyatmoko & Imma Indra Dewi, 2017). Selain itu, Analisis Standar Belanja (ASB) mampu mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan (*benchmarking*) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam desain aktivitas (Tressje Winerungan et al., 2018).

2.2. *Spending Review*

Spending review pada dasarnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu atau dua jenis tindakan penghematan seperti penghematan strategis, dan penghematan efisiensi (Robinson, 2017), *Spending review* juga merupakan suatu intervensi manajerial yang telah diadopsi di beberapa Negara Eropa, seperti Prancis dan Inggris, setelah krisis keuangan global, memutuskan layanan publik mana yang dapat dipotong demi kepentingan warga Negara dan keterlibatan mereka diperlukan untuk mendapatkan legitimasi sosial (Agostino et al., 2017; Micaela et al., 2017).

Sebagian besar penelitian tentang implementasi *Spending review* dilakukan di

Negara-negara yang ditandai dengan kemajuan ekonomi yang signifikan dan sistem manajemen publik yang matang (Prakoso, 2017). Dalam konteks Reviu alokasi anggaran pemerintah dapat dilakukan analisis terhadap alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2013).

- a. Analisis Inefisiensi merupakan bagian penting dalam proses peninjauan belanja yang memerlukan periode waktu yang lama dalam persiapan tahapan peninjauan di tahun yang akan datang.
- b. Analisis Duplikasi dilaksanakan dengan meneliti alokasi anggaran pada setiap kegiatan dalam RKA-KL tahun sebelumnya, jika terlihat kegiatan yang sama pada dua tempat maka hal tersebut merupakan indikator dari duplikasi.
- c. Analisis Einmalig adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan meninjau alokasi anggaran sebelumnya yang programnya akan selesai dalam satu tahun anggaran seperti penyusunan masterplan dan pembangunan gedung kantor yang bukan multiyears.

Spending review pada intinya merupakan bagian dari sistem penganggaran berbasis kinerja, hal ini dikarenakan informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan anggaran (Parhusip, 2016).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam (Creswell, 2015; Mohajan, 2018), menjelaskan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan lebih memahami suatu fenomena, hal ini digunakan untuk mempelajari suatu studi kasus dalam konteks yang terbatas. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat menafsirkan suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan teliti (Mohajan, 2018; Parhusip, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Spending Review* pada alokasi anggaran pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017. Kemudian, Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan dari pengumpulan informasi secara langsung dari sumber penelitian yaitu melalui interview kepada stakeholders terkait, Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti

laporan-laporan resmi Pemerintah, jurnal nasional dan internasional dan juga beberapa buku untuk mendapatkan hasil yang relevan (Raco, 2010). dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan untuk dianalisis adalah data realisasi barang operasional dan non operasional beberapa satuan kerja terkait pada periode tahun anggaran sebelumnya.

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan secara siklus dan bertahap (Miles & Huberman, 2014). Terdiri dari beberapa siklus yaitu tahap kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kodifikasi data dengan melakukan pencermatan terhadap data yang telah didapatkan serta menginterpretasikan data yang diperoleh. Sementara itu tahapan penyajian data dilakukan dengan melakukan pengelompokan data sesuai dengan teori *spending review* yang ada meliputi inefisiensi, duplikasi, dan einmalig dalam Anggaran Kementerian/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Inefisiensi

Dalam beberapa kasus analisis efisiensi dapat dilakukan sebagai bagian integral dari proses peninjauan belanja, tetapi dalam beberapa kasus lainnya harus dilakukan dalam periode waktu yang lebih lama dalam persiapan untuk tahap peninjauan anggaran di masa depan (Robinson, 2017). Berdasarkan metodologi pengukuran inefisiensi pada RKA Satker Tahun Anggaran 2017, seluruh satuan kerja di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) satuan kerja, ditemukan indikasi inefisiensi sebesar Rp27.696.935.009 (dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan rupiah)

Indikasi inefisiensi tersebut terjadi pada 32 (tiga puluh dua) Kementerian/Lembaga. Indikasi inefisiensi terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a. Adanya kelebihan penetapan harga satuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM);
- b. Kelebihan perhitungan jumlah honorarium;
- c. Alokasi melebihi indeks (listrik);
- d. Kesalahan perhitungan harga satuan dan volume kegiatan;
- e. Inrelevansi perjalanan dinas.

Rincian inefisiensi per dilihat pada tabel berikut:
Kementerian/Lembaga dan per-sektor dapat

Tabel 2. Inefisiensi Alokasi pada RKA Satker TA 2017 Kementerian/Lembaga

No	Kode BA	Uraian Bagian Anggaran	Jumlah Inefisiensi
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	366,085,962
2	005	Mahkamah Agung	170,226,516
3	006	Kejaksaan Republik Indonesia	434,168,600
4	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	2,767,031,354
5	015	Kementerian Keuangan	15,619,625,000
6	018	Kementerian Pertanian	53,095,000
7	019	Kementerian Perindustrian	11,160,000
8	022	Kementerian Perhubungan	1,962,058,000
9	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	63,028,054
10	024	Kementerian Kesehatan	368,758,604
11	025	Kementerian Agama	309,079,832
12	026	Kementerian Ketenagakerjaan	20,545,000
13	027	Kementerian Sosial	11,470,000
14	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33,556,668
15	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	231,602,296
16	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	378,720,000
17	042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	358,331,072
18	054	Badan Pusat Statistik	288,898,466
19	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	420,882,214
20	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	137,790,996
21	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,685,169,272
22	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	598,444,817
23	066	Badan Narkotika Nasional	13,110,000
24	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	115,488,383
26	076	Komisi Pemilihan Umum	27,962,590
27	089	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	
28	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	37,015,195
29	107	Badan SAR Nasional	40,440,000
30	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	256,730,000
31	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	400,000
32	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	489,491,468
Jumlah Seluruhnya			27,696,935,009

Sumber : (Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI, 2017).

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa inefisiensi anggaran paling tinggi adalah pada satuan kerja yang memperoleh alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan yaitu

sebesar Rp. 15.619.625.000 atau sebesar 56,39 persen dari jumlah keseluruhan. Berikut ini ditampilkan tabel rekapitulasi inefisiensi pada alokasi anggaran pada kementerian keuangan:

Tabel 3. Rekapitulasi Inefisiensi Pada Kementerian Negara/ Lembaga Kementerian Keuangan

No	Satker	Uraian Inefisiensi pada Belanja Berang	Rupiah
1	Kantor Wilayah DJBC Kepulauan Riau	Ongkos Angkut BBM	1.152.000.000
		Pemeliharaan Speedboat	1.819.269.000
2	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Tanjung Pinang	Pemeriksaan dan Pengawasan	16.500.000
		Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	13.680.000
		Pembinaan / Konsultasi	337.960.000

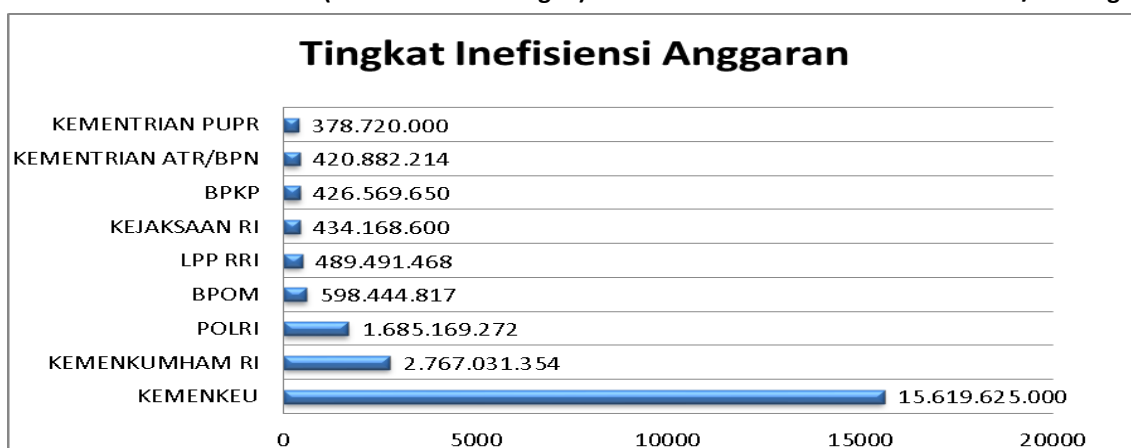
	Kumandah	2.331.000.000
3	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun	Pemeliharaan Travelif Dok Angkat 136.530.000
	Pemeliharaan Tower Crane	98.900.000
	Pemeliharaan Elektronik Generating Set 500 KVA	64.314.000
	Pemeliharaan Elektronik Generating Set 135 KVA	31.455.000
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Tarempa	Pemeriksaan dan Pengawasan 169.640.000
	Pemeliharaan Printer	280.000
	Pembinaan/Konsultasi	227.016.000
5	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Batam	Pembinaan/Konsultasi 218.600.000
	Pemeliharaan Kapal Patroli termasuk BBM, Pelumas dan Docking Kapal	8.937.013.000
Total		15.567.837.000

Sumber: (K. K. R. Dirjen Perbendaharaan, 2017).

Tabel diatas menunjukan bahwa ada 5 (lima) satuan kerja di Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, dimana pada satuan kerja tersebut terdapat 16 item kegiatan belanja barang yang melebihi standar jumlah yang telah ditetapkan dan akhirnya mencapai angka inefisiensi dengan jumlah Rp.

15.567.837.000. Selanjutnya indikasi inefisiensi karena kesalahan perhitungan anggaran pada posisi tertinggi kedua dan ketiga secara berturut-turut adalah satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp2.767.031.354 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.962.058.000.

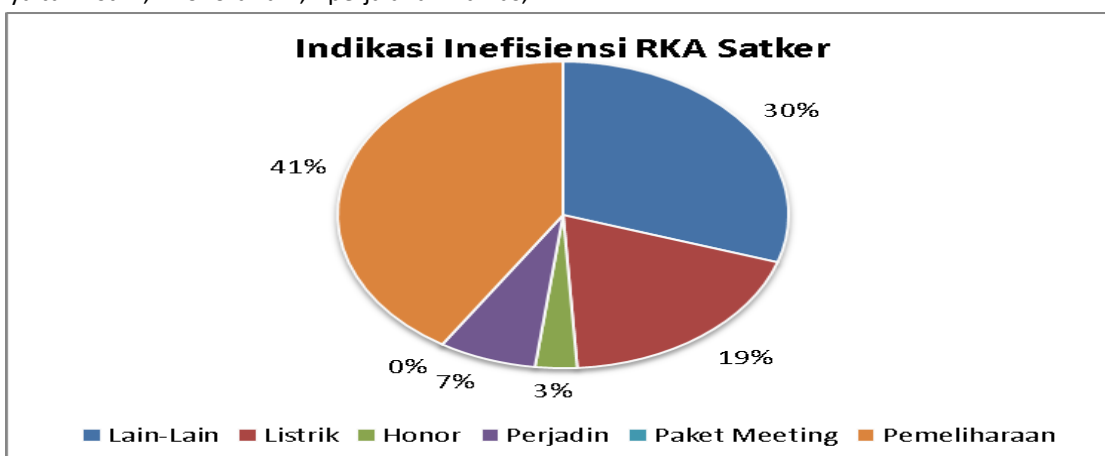
Grafik 1. Inefisiensi Alokasi (Inefisiensi Perhitungan) Pada RKA Satker TA 2017 Kementerian/Lembaga



Sumber: (Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI, 2017).

Sebagai analisis lanjutan, dikelompokkan indikasi inefisiensi yang ditemukan dalam reuvi akun RKA Satker, menjadi 6 (enam) kelompok yaitu listrik, honorarium, perjalanan dinas,

Tahun Anggaran 2017 Satker lingkup Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kelompok tersebut ditampilkan dalam diagram berikut:



Sumber: (Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI, 2017).

Dalam diagram tersebut, indikasi inefisiensi terbesar adalah untuk belanja biaya pemeliharaan (41%) dan listrik (19%).

4.2. Analisis Duplikasi

Analisis duplikasi merupakan analisis terhadap satu program yang terdapat dua kegiatan dengan output yang sama, atau dalam satu kegiatan terdapat dua komponen kegiatan yang sama (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2013).

Berdasarkan hasil revidi alokasi anggaran untuk mengidentifikasi duplikasi pada Rencana Anggaran (RKA) Satker Tahun Anggaran 2017, diperoleh data besarnya indikasi duplikasi sebesar Rp 2.113.287.000. Indikasi Duplikasi

tersebut diketahui sebagian besar disebabkan adanya komponen pembuatan laporan/kegiatan yang dilakukan berulang-ulang pada suatu kegiatan dengan satu keluaran hasil yang ingin diwujudkan.

Hal tersebut menunjukkan adanya komponen kegiatan yang dimasukkan ke dalam alokasi anggaran hanya untuk kebutuhan maksimalisasi penggunaan pagu anggaran sesuai baseline, namun menyebabkan terjadinya duplikasi anggaran. Indikasi duplikasi tersebut ditemukan pada 6 (enam) Kementerian/Lembaga, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Inefisiensi Alokasi (Duplikasi) pada RKA Satker TA 2017 Per Kementerian/Lembaga

No	Kode Bagian Anggaran	Uraian Bagian Anggaran	Jumlah Inefisiensi
1	0112	BP Batam	1,051,507,000
2	022	Kementerian Perhubungan	630,500,000
3	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	420,000,000
4	076	Komisi Pemilihan Umum	10,000,000
5	025	Kementerian Agama	1,280,000
Jumlah Seluruhnya			2,113,287,000

Sumber: (Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI, 2017).

Berdasarkan Tabel 3 diatas, terlihat bahwa inefisiensi anggaran karena duplikasi paling tinggi adalah pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu sebesar Rp. 1.051.507.000 atau sebesar 49,76 persen dari jumlah

inefisiensi seluruhnya. Berikut ini disajikan tabel tentang adanya alokasi anggaran pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terlihat dilakukan berulang kali yaitu:

Tabel 5. Duplikasi Anggaran Pada RKA Satker BP Batam TA 2017

Jenis Belanja	Uraian Duplikasi	Jumlah
Belanja Barang	Perbaikan Jalan Terminal Umum Curah Cair Kabil	173.062.000
Belanja Barang	Normalisasi Saluran Terminal Umum Curah Cair Kabil	53.625.000
Belanja Barang	Pemeliharaan Gedung Kantor Terminal Umum Curah Cair Kabil	179.580.000
Belanja Barang	Pemeliharaan Gedung Kantor Terminal Umum Curah Cair Kabil	179.580.000
Belanja Modal	Pengadaan Kendaraan Roda 4/ Pick up Operasional Kantor	232.830.000
Belanja Modal	Pengadaan Kendaraan Roda 4/ Pick up Operasional Kantor	232.830.000
Total		1.051.507.000

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2020.

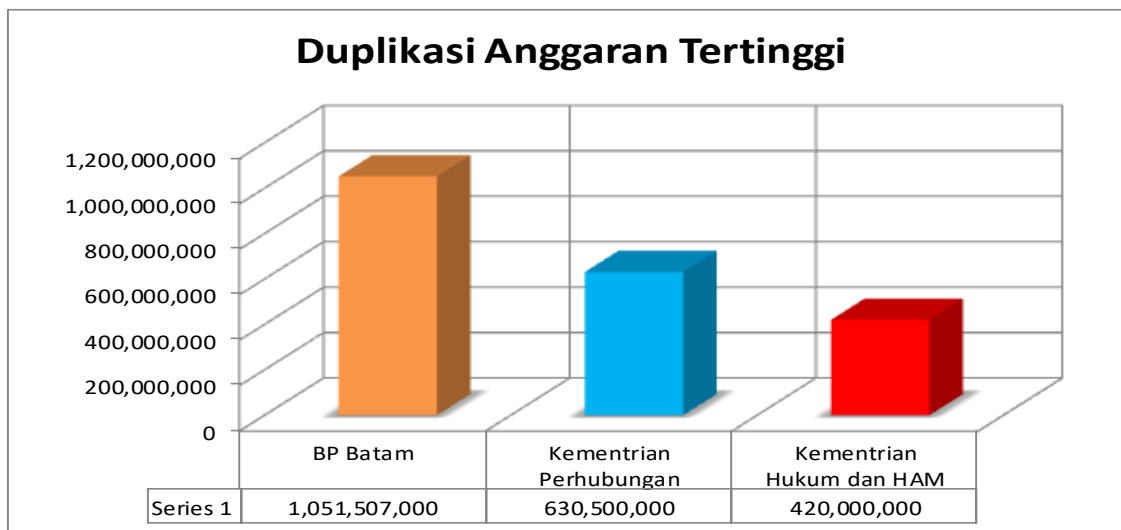
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada 4 item belanja barang yang seharusnya bisa dijadikan 2 item, yaitu Perbaikan jalan dan saluran terminal umum curah cair kabil, serta Pemeliharaan gedung kantor terminal umum curah cair kabil.

Kemudian, pada belanja modal terlihat duplikasi belanja yang terlihat berulang-ulang dan seharusnya dapat dijadikan satu realisasi belanja yaitu Pengadaan Pick up operasional kantor.

Selanjutnya indikasi inefisiensi karena duplikasi pada posisi tertinggi kedua dan ketiga secara berturut-turut adalah pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp630.500.000 dan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 420.000.000.

Grafik 3. Inefisiensi Alokasi (Duplikasi) pada RKA Satker TA 2017 Kementerian/Lembaga

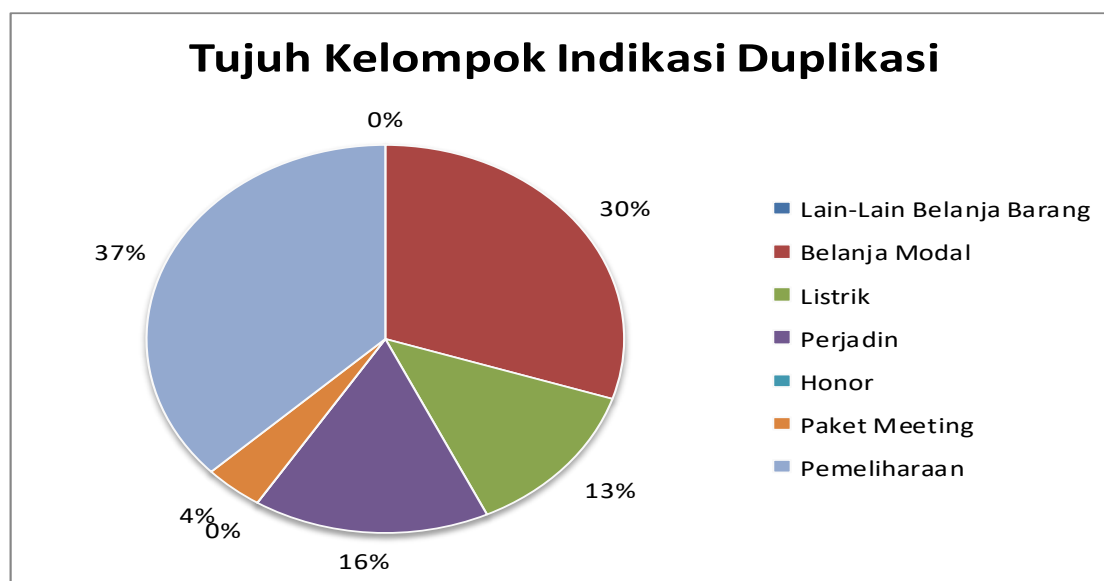


Sumber: (Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI, 2017).

Sebagai analisis lanjutan, penulis mencoba untuk menggambarkan duplikasi tersebut menjadi 7 (tujuh) kelompok indikasi duplikasi, dimana meliputi listrik, perjalanan dinas, honorarium, paket meeting, pemeliharaan, lain-lain belanja barang, dan belanja modal. Berdasarkan proporsinya, indikasi duplikasi paling banyak ditemukan pada belanja biaya pemeliharaan dan belanja modal. Indikasi duplikasi pada belanja biaya pemeliharaan

sebanyak 37 persen di antaranya ditemukan untuk anggaran pemeliharaan gedung kantor terminal umum, perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Sedangkan indikasi duplikasi pada belanja modal sebanyak 30 persen ditemukan pada pengadaan kendaraan roda empat dan pengadaan meubelair. Proporsi indikasi duplikasi tersebut sebagaimana ditampilkan pada diagram berikut:

Grafik 4. Proporsi Indikasi Duplikasi



Sumber: (Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI, 2017).

4.3. Analisis Einmalig

Salah satu sumber potensi ruang fiskal yang besar adalah bersumber dari einmalig. Program atau kegiatan yang dilaksanakan satu kali saja atau yang sifatnya tidak akan diulang atau dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya merupakan sumber adanya einmalig. Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Tahun Anggaran 2017 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, tidak ditemukan adanya indikasi Einmalig (K. K. R. Dirjen Perbendaharaan, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis *Spending Review* dalam alokasi anggaran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 terlihat bahwa alokasi anggaran yang terindikasi inefisiensi sebesar Rp27.696.935.009, indikasi duplikasi sebesar Rp2.113.287.000, namun tidak ditemukan indikasi einmalig. Indikasi inefisiensi alokasi paling banyak ditemui untuk anggaran belanja biaya pemeliharaan dan listrik, sementara indikasi duplikasi paling banyak ditemui untuk belanja biaya pemeliharaan dan belanja modal (aset tetap). Berdasarkan kesimpulan analisis *spending review* dalam alokasi anggaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi kepada satker di lingkup Provinsi Kepulauan Riau terkait penyusunan RKA Satker serta pembebanan akun yang paling sesuai, untuk mengurangi indikasi inefisiensi alokasi, duplikasi, dan einmalig. Pembinaan ini kiranya juga dapat dilakukan di tingkat pusat (K/L) agar pemahaman dapat diselaraskan.
2. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait analisis *spending review* terkhusus dalam perspektif tata kelola keuangan publik, mengingat masih minimnya hasil penelitian terkait *spending review* dalam ruang lingkup pemerintahan di Indonesia.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2016 tanggal 10 Februari tahun 2016 tentang Penyusunan *Spending Review*, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan penyusunan laporan *Spending Review* Tahun

2017 di lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Selain dalam perencanaan anggaran, *Spending Review* ini dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran periode sebelumnya.

Dengan adanya analisis *spending review*, pemerintah pusat dapat mengurangi alokasi belanja pemerintah pusat untuk Belanja K/L apabila dipandang bahwa perlu dilakukan kebijakan penghematan/pemotongan anggaran dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara. Mengingat bahwa artikel ini hanya memfokuskan pada review alokasi anggaran, maka peneliti mengharapkan adanya *research* yang berkelanjutan terkait analisis *spending review* yang lebih komprehensif untuk mengetahui bagaimana review kinerja pelaksanaan anggaran, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau.

7. PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Dosen Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Publik Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. yang telah memberikan banyak ilmu serta saran perbaikan dalam penelitian ini, dan juga kepada teman-teman Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang banyak berkontribusi dalam penyempurnaan dan proses penyelesaian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Arena, M., Catalano, G., Erbacci, A., Agostino, D., Arena, M., ... Catalano, G. (2017). *spending review experience Public engagement through social media : the spending review experience. The Journal of Public Money & Management*, 37(1), 954–962. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1249596>
- Aisah, S., Deviyanti, D. R., & Kusumawardani, A. (2019). Analisis belanja daerah pada pemerintah kota samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4).
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damar Daru Sukmaji, A. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–9.
- Dewi Rosa Indah, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, Heru Fahlevi, P. A. (2017). Kajian

- Kepatuhan Pemerintah Daerah atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Aceh (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6(1), 627–637.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2013). Spending Review 2013 Metodologi Kerangka Kerja Spending Review. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan*, 1–17.
- Dirjen Perbendaharaan, K. K. R. (2017). *Spending Review Provinsi Kepulauan Riau 2017*.
- Dirjen Perbendaharaan, K. W. P. K. R. (2016). *Spending Review APBN 2016 Provinsi Kepulauan Riau*.
- Firda Rahmadhany Arief, Y. M. B. dan N. I. (2017). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit. *Jurnal Ekonomi*, 25(2), 1–14.
- Kanwil DITJEN Perbendaharaan Provinsi KEPRI. (2017). Spending Review Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Riau. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan* (pp. 1–42).
- Micaela, A., Rossana, C., Lidia, U., Minco, D., Santori, E., Altobelli, S., ... Simonetti, G. (2017). Diagnostic imaging and spending review: extreme problems call for extreme measures. *The Journal Springer: La Radiologia Medica*, 9(1), 1–6. <https://doi.org/10.1007/s11547-016-0721-7>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (n.d.). Saldana.(2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 275–322.
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *UTC Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48. Retrieved from https://mpa.ub.uni-muenchen.de/85654/1/MPRA_paper_85654.pdf
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Parhusip, B. (2016). Analisis Implementasi Spending Review pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 191–211.
- Prakoso, R. (2017). *Indonesia Spending Reviews in the Context of Financial Management Reform*. The Netherlands: Institute of Social Studies.
- Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Robinson, M. (2017). The role of evaluation in spending review. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 32(3), 305–315. <https://doi.org/10.3138/cjpe.43177>
- Tressje Winerungan, Vekie A. Rumat, E. N. W. (2018). Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (Asb) Tahun 2015-2017 (Studi Kasus Inspektorat Kota Bitung). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 1–14.
- Veiga, L. G., & Kurian, M. (2015). Intergovernmental Fiscal Relations: Questions of Accountability and Autonomy. In M. Kurian & R. Ardakanian (Eds.), *Governing the Nexus* (pp. 63–81). Cham: Springer International Publishing.
- Y. Sri Pudyatmoko, I. I. D. (2017). Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(1), 31–42.